

Peran Pendidikan Terhadap Pengembangan Masyarakat di Indonesia

Oleh : Salsabila Rossa Aprilia

Email: Sabilrossa@gmail.com

A. Pendahuluan

Pengembangan masyarakat merupakan proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pengembangan masyarakat, pendidikan adalah bidang yang sangat penting bagi suatu Negara (Saptono, 2016). Dan menurut John C. Bock dalam Philip et al. (1982) mengidentifikasi peran pendidikan adalah untuk: a) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; b) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial dan c) Meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Pendidikan sebagai proses manusia memperoleh ilmu pengetahuan sangat penting dalam membentuk kemampuan berpikir (Suparno, 2014). Namun, belakangan ini banyak permasalahan yang terjadi dalam proses pendidikan yang mempengaruhi perannya dalam pengembangan masyarakat. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat tujuh permasalahan fatal yang terjadi dalam pendidikan Indonesia. Pertama, nasib program wajib belajar (wajib) 12 tahun yang belum terealisasikan. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum. UU Sisdiknas harus diamandemen khususnya pasal terkait wajib sembilan tahun diubah menjadi 12 tahun. Atau, bisa juga didorong melalui Instruksi Presiden dan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan wajib 12 tahun di

provinsi (Ubaid, 2016). Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA. Peralihan wewenang justru menimbulkan masalah baru. Ketiga, pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (Desember 2016), terdapat 78 persen guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah yang terlalu fanatic terhadap agamanya. Hal ini merupakan cara pandang yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Jika dibiarkan, benih-benih intoleran dan sikap keagamaan yang radikal akan tumbuh subur di sekolah (Ubaid, 2016). Keempat, pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum tepat sasaran dan tepat waktu. Bersekolah bagi kaum marginal masih jadi impian. Marginal di sini terutama dialami oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kelima, kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela. Potret buram pendidikan di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah dan pengaduan pungli. Modus kekerasan ini sudah sangat rumit untuk diurai, karena para pelakunya dari berbagai arah. Keenam, ketidak-sesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. Ini menunjukkan bahwa ada gap antara dunia industri dengan ketersediaan tenaga terampil di Indonesia. Ini penting, sebab di era MEA, serbuan tenaga kerja asing akan meminggirkan dan memensiundikan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di sekolah juga harus mampu menjawab masalah ini.

B. Kajian Pustaka

1. Makna Pengembangan Masyarakat

Pembangunan masyarakat (community development) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Graha, 2009)

Pengembangan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan cara berpikir masyarakat oleh karena dampak dari globalisasi. Onny S. prijono dan A.M.W. Pranoko (1996:3), pemberdayaan dari kata empower berarti to give power or authority to artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian lain adalah to give ability to or enable artinya upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (Keterpaduan, Otonomi, & Septiarti, n.d.).

Pengembangan masyarakat ini bisa juga disebut sebagai suatu cara dalam membangun perekonomian, dimana pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. (Suparno, 2017b). Dengan pengembangan tersebut, dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara.

Pengembangan masyarakat juga bisa dilakukan melalui pembukaan wirausaha umkm yang diberi oleh pemerintah. Sektor wirausaha umkm ini dapat disebut sebagai “pahlawan pembangunan”. Mengapa? Karena meski jumlahnya kecil, kontribusi mereka tidak kurang dari 70% terhadap perekonomian nasional. Wirausaha bergerak diberbagai sektor usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). Data Statistik Badan Pusat Statistika (BPS, 2015) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57,9 juta. Sektor ini berkontribusi terhadap PDB lebih kurang setara 59%. Selain itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97,30%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor ini ternyata mampu mengurangi angka pengangguran (Saptono, Dewi, & Suparno, 2017)

2. Paradigma Pendidikan dalam Pengembangan Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. (Suparno, 2017a)

Peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, pendidikan tidak dapat lagi disebut sebagai *engine of growth*, sebab kemampuan dan keberhasilan lembaga pendidikan formal sangat terkait dan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, terutama kekuatan ekonomi umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lembaga pendidikan sendiri tidak dapat meramalkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja, sebab kebutuhan tenaga kerja baik jumlah dan kualifikasi yang diperlukan berubah dengan cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat. Paradigma peran pendidikan dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan interaktif, melahirkan paradigma pendidikan Sistemik-Organik dengan mendasarkan pada doktrin ekspansionisme dan teleologi. Ekspansionisme merupakan doktrin yang menekankan bahwa segala obyek, peristiwa dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh. Suatu bagian hanya akan memiliki makna kalau dilihat

dan dikaitkan dengan keutuhan totalitas, sebab keutuhan bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Keutuhan satu dengan yang lain berinteraksi dalam sistem terbuka, karena jawaban suatu problem muncul dalam suatu kesempatan berikutnya.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menekankan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri dan 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menuntut pendidikan bersifat double tracks. Artinya, pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat double tracks menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Dengan double tracks ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat.

C. Kesimpulan dan Saran

Pengembangan masyarakat (community development) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pengembangan masyarakat, peran pendidikan sangatlah penting. Namun, belakangan ini banyak permasalahan yang terjadi dalam proses pendidikan yang dapat mengganggu ataupun menghambat pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan pengembangan masyarakat seharusnya dikaji lagi agar prosesnya menjadi lebih efektif.

Saran:

Dalam bidang pendidikan, sebaiknya pemerintah merevisi dan mengkaji ulang serta memperbaiki kurikulum dalam proses pendidikan di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Selain itu, pemerintah menegaskan UU tentang suap dan pemungutan liar agar tidak terjadi pemungutan liar yang berakibat pada peningkatan angka putus sekolah.

Dalam segi wirausaha, pemerintah seharusnya memberdayakan umkm masyarakat agar dapat mengembangkan potensi bakat berwirausaha masyarakat sehingga laju perekonomian Indonesia dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117–126. <https://doi.org/10.21067/JEM.V5I2.243>
- Keterpaduan, B., Otonomi, D. A. N., & Septiarti, S. W. (n.d.). (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul) *) Penulis Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY Pendahuluan Para ahli ilmu sosial dan politik sepakat bahwa akar permasalahan terjadinya krisis multidimensi di Indonesia adala, 1–18.
- Saptono, A. (2016). Lingkungan Belajar , Sikap Terhadap Profesi Guru terhadap Intensi Menjadi Guru (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta) Ari Saptono, 14(1).
- Saptono, A., Dewi, R. P., & Suparno, S. (2017). Pelatihan Manajemen Usaha Dan Pengelolaan Keuangan Ukm Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Purna Di Sukabumi Jawa Barat. *Sarwahita*, 13(1), 6–14. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.131.02>
- Suparno. (2014). the Effects of Pbl Method Using the Hypermedia To the Students' Critical Thinking Skill on the Social Studies Subject. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED) Oktober*, 2(2), 2302–2663.
- Suparno. (2017a). Pengaruh Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Dan Kecerdasan Emosional Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X Di Sma Negeri 89 Jakarta. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 14(1), 105–112. <https://doi.org/10.21009/econosains.0141.08>
- Suparno, S. (2017b). Pengaruh Tingkat Upah Dan Nilai Output Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Besar Dan Sedang Di Indonesia Tahun 2000 - 2013.

Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan, 13(2), 59–69.

<https://doi.org/10.21009/econosains.0132.06>